

BAB II

INTERAKSI GEOPOLITIK DAN KEPENTINGAN NASIONAL SERTA IMPLIKASI TERHADAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan dinamika hubungan geopolitik dan kepentingan nasional suatu negara, bagaimana posisi sebuah negara dapat menciptakan ruang strategis secara geopolitik, dan faktor apa yang mempengaruhi lingkungan strategis bagi suatu negara dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang efektif untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam memahami dinamika suatu negara, konsep geopolitik digunakan untuk menganalisis keterkaitan lingkungan strategis dan kepentingan nasional untuk memahami proses pengambilan keputusan yang ditentukan oleh suatu negara. Sehingga, dalam menyelesaikan bab ini, penulis akan menganalisis hubungan antara tiga variable yaitu lingkungan strategis, kepentingan nasional dan kebijakan pertahanan yang menjadi variable utama bagi eksistensi sebuah negara untuk memahami hubungan didalam ruang suatu negara. Dalam menentukan kepentingan nasional suatu negara perlu untuk memahami dinamika lingkungan strategis yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung proses perumusan kebijakan untuk mencapai target tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara dalam hubungan internasional.

2.1 Perkembangan Geopolitik Dan Keterkaitan Terhadap Kepentingan Nasional

Kajian geopolitik pertama kali dikenalkan oleh ahli geografi yang bernama Frederich Ratzel yang didefinisikan sebagai ilmu bumi politik (*political geography*). Kemudian Rudolf Kjellen dan Karl Hausofer mengembangkan kajian ini dan merubah

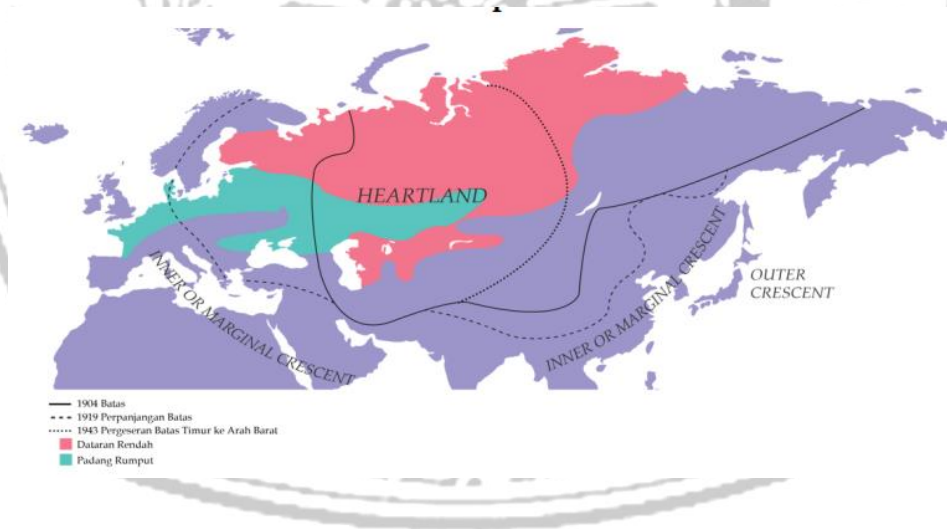
namanya menjadi (*geographical politics*). Perubahan dilakukan karena fokus kajian yang berbeda, dimana *political geography* mempelajari fenomena geografi dari aspek politik dengan fokus pada interaksi alam dengan manusia. Sedangkan, Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi yang diperuntukan untuk para aktor negara dalam proses pengambilan keputusan atau pemerintahan.²⁹ Dalam pendekatannya geopolitik merujuk lingkungan dan negara sebagai satu kesatuan hidup. Dengan konsep tersebut akhirnya geopolitik dipandang sebagai sebuah study politik yang mengaitkan ilmu geografi dengan objek negara sebagai aktor utamanya. Ratzel berasumsi sebuah negara perlu memahami ruang-ruang sebagai acuan dalam menyusun keputusan-keputusan yang dipilih menggunakan intelektualitas sebagai sebuah keefektifan.³⁰

Konsep ruang (*lebensraum*) merupakan salah satu konsep yang mendasari study geopolitik dengan mengaitkan negara sebagai objek yang menempati ruang untuk kehidupan individu didalamnya. Ratzel juga memandang bahwa ruang sebagai sebuah dinamika yang muncul atas lingkungan sehingga dalam memahaminya membutuhkan proses intelektualitas untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan ruang tersebut. berdasarkan konsep ini, negara dianggap seperti organisme yang tumbuh menempati sebuah ruang hidup. Negara harus memenuhi kebutuhan pertumbuhan indivisu didalamnya dengan asumsi semakin luas ruangnya

²⁹ Kris Wijoyo Soepandji, "Geopolitik, Negara, Dan Bangsa Masa Kini," Jurnal Kajian Lemhannas Ri 37 (2019): 41–58, [Http://Jurnal.Lemhannas.Go.Id/Index.Php/Jkl/Article/Download/50/12/](http://Jurnal.Lemhannas.Go.Id/Index.Php/Jkl/Article/Download/50/12/).

³⁰ J. Priyono & P. Yusgiantoro, *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*.

dan potensi geografisnya maka semakin besar kekuatan yang tumbuh. Apabila wadah tersebut tidak dapat memenuhi pertumbuhan individu didalamnya maka negara dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Anggapan dari Ratzel ini menyebabkan geopolitik dianggap sebagai adu kekuatan dan diterapkan oleh Adolf Hitler untuk membenarkan ekspansinya kepada negara lain untuk kepentingan nasional dan ekonomi. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Sir Halford Mackinder seorang ahli geografi yang menawarkan penguasaan hegemoni global dengan mengusung teori penguasaan benua yang di sebut teori heartland. Mackinder beranggapan bahwa: *“barang siapa yang menguasai jantung benua (heartland) maka akan menguasai worldland”*.³¹



Gambar 2. 1 Peta Geopolitik Sir Halford Mackinder

Sumber: Lemhanas RI 2022:10

³¹ Eldar Ismailov Dan Vladimer Papava, “The Heartland Theory And The Present-Day Geopolitical Structure Of Central Eurasia,” *Rethinking Central Eurasia* 2, No. 2 (2010): 66–79.

Hearthland merupakan wilayah yang memiliki kandungan minyak bumi, gas dan mineral alam yang tinggi yang membentang dari Rusia/Tiongkok, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara Hingga Maroko. Konsep dari Mackinder tersebut, menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan di timur tengah saat ini yang disebabkan dengan tingginya cadangan minyak dan gas alam. Menurutnya “*conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow*”. Hal ini menegaskan bahwa konflik timur tengah merupakan scenario yang diciptakan oleh negara-negara untuk mengontrol dan mengendalikan pasokan sumberdaya sebagai kunci kehidupan. Teori dari Mackinder ini, menyebabkan penguatan pertahanan dan keamanan diberbagai negara khususnya wilayah yang disebut sebagai *heartland* karena memiliki sumberdaya alam yang tinggi sebagai kepetingan energi konvensional.³²

Dalam perkembangan selanjutnya konsep geopolitik berubah menuju penguasaan perairan salah satunya digagas oleh seorang admiral AS A.T Mahan menawarkan proyek yang lebih strategis terutama untuk menjelma sebagai negara hegemon dengan menawarkan strategi kekuatan laut dan menekankan strategi kebebasan navigasi samudra. Mahan berasumsi bahwa “kekuatan laut merupakan unsur utama bagi kepentingan nasional sebuah negara. kejadian dilaut sangat mempengaruhi kejadian kejadian di daratan sehingga untuk mencapai kejayaan negara perlu menguasai perairan (*sea power*)”. Dalam bukunya *the influence of upon sea power history* alferd mahon menjelaskan 6 pokok utama dalam membangun *sea power*

³² Ismailov Dan Papava.

sebuah negara diantaranya: *pertama*, posisi geografis yang berbatasan dengan laut; *kedua*, bentuk fisik sebuah negara yang di tentukan atas hubungan laut, panjang daratan, kedalaman laut, bentuk alamiah dari pelabuhan; *ketiga*, karakteristik masyarakat; *keempat*, luas wilayah; *kelima*, jumlah penduduk, dan *keenam*, karakter pemerintahan.³³ Pokok-pokok tersebut menjadi elemen utama dalam menentukan kekuatan maritim suatu negara. keenam element tersebut ditujukan agar terciptanya lingkungan strategis dan komunikasi yang efektif. Sehingga, menompang kekuatan yang terkordinasi dengan proporsional dalam implemantasi pertahanan dan keamanan. Argument tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan bernegara. Mahan beasumsi bahwa kekuatan laut memberikan banyak manfaat bagi suatu negara dalam mencapai kepentingan dan pertahanan. Namun, apabila tidak dihayati dan tidak digunakan secara baik kekuatan laut justru merupakan sebuah kerugian bagi negara. alferd mahan juga memberikan alternatif lain dalam membangun kekuatan laut yang terbagi menjadi dua bagaian diantaranya; *pertama*, merupakan unsur penompang yang memuat 6 element yang ada diatas meliputi posisi geografi, letak fisik, luas wilayah, jumlah populasi, karkter nasional dan karakter pemerintahan. *Kedua*, merupakan element pendukung yang terdiri dari sumber sumber kekuatan (*sources*) seperti; kekuatan militer, armada niaga, pangkalan dan pelabuhan.³⁴

³³ Mahan, "The Influence Of Sea Power 1660 - 1783 - Capt Alfred Mahan, Usn."

³⁴ Ferdy Leorocho Et Al., "Comparative Study On Maritime Security Of Alfred Thayer And Geoffrey Till On The Strategic And Practical," International Journal Of Progressive Sciences And Technologies (Ijpsat 38, No. 1 (2023): 456-64.

Implementasi konsep dari sea power, memberikan hasil yang maksimal dalam membangun sebuah negara maritim seperti Inggris, Belanda, Dan Prancis dalam meraih kejayaan dan kemakmurannya di abad 18. Dalam bukunya Mahan juga menjelaskan pentingnya pemahaman lingkungan strategis yang ditentukan atas sejarah berdirinya suatu negara. Dengan latar belakang tersebut suatu negara akan memahami kejadian-kejadian yang dilaut memiliki keterkaitan dengan kejadian yang ada di darat. Sehingga aktor pemerintahan dapat merumuskan solusi dari permasalahan yang muncul atas lingkungan internasional. Pemanfaatan kekuatan laut yang efektif akan memberikan banyak pilihan yang tersedia untuk memberikan pilihan baru yang dapat mempengaruhi proses politik suatu negara. Berdasarkan penjelasan mengenai geopolitik tersebut, secara keseluruhan dinamika yang terjadi dalam politik global memiliki keterkaitan antara ruang geografis yang diduduki oleh suatu negara terhadap kepentingan nasional negara-negara lain.

Dinamika yang terjadi dalam perkembangan geopolitik memberikan pandangan bahwa interaksi antar negara dipengaruhi oleh faktor geografis seperti sumberdaya, akses jalur perdagangan, pertahanan dan keamanan. Perubahan situasi global, terjadi karena pertarungan kepentingan yang didorong oleh faktor geografis. Layaknya organisme, negara sebagai aktor politik selalu berusaha menembus ruang geografis dengan berbagai cara dalam mencapai kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup didalamnya. Sehingga negara sebagai wadah membutuhkan pemahaman mendalam terkait ruang wilayah yang dimiliki untuk melindungi dan menjamin

dan mempertahankannya dari ancaman yang muncul atas interkasi tersebut. maka, disimpulkan bahwa geopolitik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari dominasi faktor geografis yang ada pada suatu negara merupakan sebuah modal utama kekuatan dalam menjamin kepentingan negara untuk bertahan hidup.

2.2 Posisi Indonesia Dalam Kerangka Geopolitik

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di tengah kawasan Asia Pasifik. Dengan posisinya yang sentral, secara geopolitik Indonesia memiliki wilayah strategis yang tersusun atas bentuk wilayah kepulauan yang berada diantara samudra hindia dan samudra pasifik menciptakan jalur alami perdagangan dunia melewati kedaulatan negara ini. Bentuk wilayah kepulauan didukung dengan kekuatan sumberdaya yang tinggi karena mayoritas wilayahnya berupa perairan menghasilkan potensi perikanan, mineral tambang dan wisata bahari untuk mendukung sumber ekonomi nasional. menteri perikanan dan kelautan menjelaskan bahwa sumber daya perikanan Indonesia mencapai 22,76 juta ton ditahun 2019 terus bertambah setiap tahunnya.³⁵ Disamping potensi kelautan, Indonesia juga menjadi negara yang mengandung kekayaan alam yang tinggi seperti gas alam dan minyak mentah. Menurut kementerian energy dan sumberdaya mineral dalam siaran pers tahun 2021, arifin tasrif menemukan bahwa produksi minyak Indonesia sebanyak 700 ribu

³⁵ Andi Agus, "Marine/Fisheries Resource Using (Case Study Ternate Manucipality, North Molucca)," *Torani: Journal Of Fisheries And Marine Science* 1, No. 2 (2018): 93–102, <https://doi.org/10.35911/Torani.V1i2.4511>.

barrel/hari. Sedangkan untuk gas alam mencapai 6 triliun fps/harinya.³⁶ Selain itu, negara ini juga memiliki garis pantai terpanjang yang mengasihkan basis pariwisata yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Destinasi wisata yang ditawarkan oleh negara ini, tidak sebatas pada sektor perairan. Namun, mencakup wisata daratan seperti pegunungan dan kebudayaan.³⁷

Bentuk wilayah kepulauan yang membentang dari sabang sampai merauke menciptakan berbagai bentuk kebudayaan tradisional yang beragam sesuai dengan jenis etnis dan wilayah mereka berada. Dalam pandangan geopolitik, Indonesia tidak pernah kedap terhadap perkembangan lingkungan eksternal. Hal ini bisa dibuktikan dengan sejarah perkembangan bangsa ini dari masuknya Hindu, Budha Islam, Barat merupakan kultur yang melekat pada diri masyarakat Indonesia. Dinamika ini tentunya akan memberikan dampak pada perkebangan bangsa ini, terutama dengan kepemilikan potensi yang tinggi. Dilihat dari perkembangannya, pergerakan negara saat ini berusaha untuk menciptakan ruang-ruang dalam mengakomodasi kepentingnya dengan berbagai cara baik secara ekspansionis, hegemonic atau kolonialistik. Sehingga, hal ini memunculkan problematika dalam perkembangan negara khususnya bidang pertahanan dan keamanan. Dengan dasar ini, tampaknya konsep geopolitik masih menjadi variable

³⁶ Esdm, "Menteri Esdm: Cadangan Minyak Indonesia Tersedia Untuk 9,5 Tahun," Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2024, 5–6.

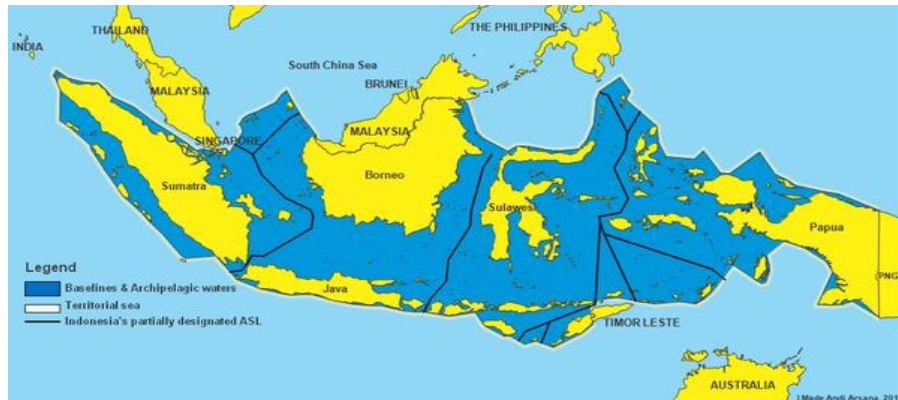
³⁷ Kemenparekraf, "Outlook Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif," Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Jakarta – Indonesia, 2020, 1–68, https://Bankdata.Kememparekraf.Go.Id/Upload/Document_Satker/A6d2d69c8056a29657be2b5ac3107797.Pdf.

utama yang krusial dalam mendorong suatu negara berusaha untuk menembus batas ruang dan menjalin hubungan terhadap ruang lainnya. Meskipun upaya- upaya telah dilakukan seperti pengembangan teknologi, pembentukan istititusi internasional maupun organisasi keamanan global.³⁸

Faktanya dilapangan mengatakan bahwa ancaman saat ini masih menjadi mimpi buruk bagi eksistensi sebuah negara. hal ini, tentunya menimbulkan sebuah problematika terhadap bidang pertahanan dan keamanan. Dalam konteks Indonesia, pertahanan dan keamanan menjadi salah satu prinsip kekuatan bangsa. Merujuk pada konsep Alferd Mahan, mengatakan bahwa pemahaman lingkungan merupakan modal utama dalam menjaga melindungi kedaulatan suatu negara.³⁹ Secara Geopolitik, Indonesia memiliki posisi yang cukup vital terutama bagi sektor pertahanan dan keamanan nasional, wilayah Indonesia yang didominasi oleh perairan terbagi menjadi empat bagian yang dapat dimanfaatkan negara untuk mencapai kepentingan nasional ataupun proyeksi kekuatan maritim. Pembagian wilayah ini merupakan hasil kesepakatan pemerintahn Indonesia dengan negara asing dalam ranka menjamin perdamaian dan ketertiban keamanan negara berdaulat yang tertuang akan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan disepakati oleh *International Maritime Organitations (IMO)*.

³⁸ Marciano Norman, “Perkembangan Lingkungan Strategis Dan Prediksi Ancaman Tahun 2008,” *Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis*, 2008, 1–11.

³⁹ Alfred Thayer Mahan, “America ’ S Grand Strategy In Asia : What Would Mahan Do ?,” *Snapshot 2 Strategic Snapshots*, 2010.



Gambar 2. 2 Indonesia achipelagic sea lines I,II,III

Sumber: Indonesian Government Regulation No 37 tahun 2002:21

Pembagian ini merupakan upaya dalam memahami karakteristik ruang strategis Indonesia yang berupa kepulauan dan menjadi pedoman akan batas wilayah Indonesia berada diperairan dalam proses pelaksanaan pertahanan dan keamanan.⁴⁰ Pembagian wilayah ini mencakup ALKI I meliputi; laut natuna utara, selat karimata, selat sunda hingga ke samudra hindia; ALKI II mencakup; laut Sulawesi, selat makasar, selat lombok hingga samudra hindia; ALKI III A diantaranya; laut arafuru menuju samudra hindia; dan ALKI III B meliputi, wilayah timur pulau timor menuju samudra hindia. Dalam pandangan geopolitik pembagian wilayah tersebut memunculkan problematika bagi pemerintahan Indonesia dan perdagangan dunia.⁴¹

⁴⁰ Etty R. Agoes, "Upaya Diplomatik Indonesia Dalam Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)," Indonesian Journal Of International Law, 2009, <https://doi.org/10.17304/ijil.Vol6.3.207>.

⁴¹ Megawati Soekarnoputri President Of The Republic Of Indonesia, "Annex Vii Indonesian Government Regulation Number 37 2002," 2002, 21.

Setidaknya terdapat dua alasan yang menjadikan wilayah ini sangat penting bagi kedaulatan Indonesia. Alasan pertama, wilayah ALKI secara keseluruhan tersusun atas choke point geopolitik yang menjadi vital bagi perdagangan internasional. Choke point merupakan titik-titik sempit yang sangat rawan kecelakaan dan tindak kriminal yang harus dilewati oleh transportasi laut yang melewati wilayah ini. Menurut Mahan choke point merupakan titik-titik strategis yang membutuhkan pengawasan karena menyimpan banyak resiko yang dapat mempengaruhi perekonomian global dan keamanan suatu negara. Indonesia memiliki 4 dari 6 choke point dunia yang digunakan sebagai jalur inti atau selat penting (*Major Strait*) transportasi laut meliputi; Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makasar, Selat Lombok.⁴² Mackinder juga mengklasifikasikan empat kawasan dalam konsep *Heartland*. *Pertama, Outer Continental Or Island* meliputi; Benua Amerika, Afrika Selatan, Asia Tenggara Dan Australia. *Kedua, Marginal Land* meliputi; Eropa Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara Dan Daratan Tiongkok. *Ketiga, Desert* terletak di Afrika Utara dan *keempat, Heartland* mencakup; Asia Tengah Dan Timur Tengah.⁴³

Dalam skenario perdagangan internasional, wilayah Indonesia dikelilingi oleh negara-negara produsen dimana secara keseluruhan pendistribusinya melewati perairan. Contohnya, disisi selatan peta dunia, ada negara Australia yang memuat produksi sumberdaya mineral tambang berupa batubara/nikel ataupun produk lain,

⁴² Prasetya, "Geografi Politik Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan."

⁴³ Ismailov Dan Papava, "The Heartland Theory And The Present-Day Geopolitical Structure Of Central Eurasia."

dalam scenario geopolitik adalah jika Australia ingin mengespor produk domestik secara otomatis akan melewati selat Lombok menuju selat Makassar arahnya ke utara Indonesia atau melewati selat Lombok menuju ke perairan dalam dan lurus ke selat Makassar jika ingin menuju ke barat Indonesia. Contoh yang kedua adalah di wilayah utara Indonesia terdapat kawasan Asia Timur dimana terdiri atas Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dimana ketiganya merupakan negara produsen. Apabila mereka ingin mengespor ke kawasan Timur Tengah harus melewati Singapura kemudian menuju selat Malaka atau menuju Indonesia ke selat Sunda. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah Indonesia sangat strategis secara geopolitik maupun geoekonomi dan menjadi salah satu jawaban Indonesia selalu terpengaruh terhadap dinamika eksternal.

Alasan kedua adalah bidang pertahanan dan keamanan, dari scenario perdagangan yang sangat strategis. Namun dalam sektor pertahanan, posisi Indonesia menimbulkan sebuah problematika tingkat ancaman yang tinggi secara geopolitik. Sektor perairan menjadi salah satu faktor krusial bagi Indonesia karena menyimpan sumberdaya alam yang tinggi. Sehingga, dalam melindungi kedaulatannya dibutuhkan upaya yang efektif sebagai kepentingan nasional dan pelaksanaan pertahanan dan keamanan. Karena posisi sentral yang strategis tersebut, banyak permasalahan ancaman pula yang dihasilkan meliputi pelanggaran lalu lintas, eksploitasi sumberdaya baik secara legal atau ilegal, penyelundupan maupun ancaman transnasional dari perebutan wilayah. Dinamika ini, membutuhkan keterlibatan antara pemerintah negara dan masyarakat untuk melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia. Sehingga

dibutuhkan sebuah instrument yang strategis untuk menanggapi permasalahan ini. Sebagai upaya dalam mempertahankan eksistensi bangsa ini. Perairan dan sumberdaya merupakan modal utama dalam mewujudkan berbagai kepentingan negara. Maka dalam rangka mempertahankan, mengelolah dan melindungi kedaulatan negara, diperlukan *political will* yang menjadi pondasi kekuatan untuk mendorong komponen didalam suatu bangsa.⁴⁴

2.3 Sejarah Kemaritiman Dan Lahirnya Indonesia Sebagai Poros Maritim

Dunia

Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat, bahwa jauh sebelum abad pertama masyarakat Indonesia telah menjalin hubungan sosial dan ekonomi dengan berbagai wilayah di seluruh dunia. Dimulai ketika munculnya ajaran hindu, masuknya agama budha ke Indonesia, hingga dinamika kerajaan yang melebur dimasyarakat merupakan titik awal sejarah perkembangan kemaritiman Indonesia..⁴⁵ dalam buku yang berjudul "*Indonesia county studies*" Mencatat, sekitar tahun 1700 SM komoditas asli maluku yaitu cengkeh, telah digunakan oleh masyarakat Suriah dan Dinasti Han di Tiongkok sebagai bahan obat tradisional. Tidak hanya itu, beberapa produk, seperti kerang, tembikar, marmer, dan batu mulia telah telah didistribusikan ke sejumlah wilayah eropa dan timur tengah. Dengan bukti sejarah yang telah di temukan, pendistribusian barang Asia Tenggara yang meluas ke utara hingga ke Tiongkok dan

⁴⁴ Prasetya, "Geografi Politik Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan."

⁴⁵ Agus R Santoso Editor Senja Kala Yahya Anggota Abdul Cholik Bayu Patriasari Desi Mulyaningsih Suryagung Sp Sapta Sunjaya Dan Beny Oktavianto, "Nas A K Kah Sumber A Arsi Rsip K P Kema Aritima Man li Ketua Desain Gra S & Lay Out Naskah Sumber Arsip Kemaritiman," N.D.

wilayah barat, India dan pantai timur Afrika melewati wilayah Indonesia.⁴⁶ Apabila meninjau dari sejarah peradaban kerajaan sriwijaya, pemanfaatan sektor perairan menjadi salah satu faktor penting yang membawa kejayaan dan kemakmuran kerajaan. Secara geografis kerajaan sriwijaya berdiri sekitar abad-7 yang berada di pulau Sumatra dengan cakupan wilayah meliputi tepi teluk jambi hingga tepi Palembang.



Gambar 2. 3 peta lokasi kerajaan sriwijaya

Sumber: Britanica.Inc

Jika dilihat dari geografis yang ada pada gambar diatas, secara geopolitik, posisi kerajaan sriwijaya memiliki dua chokepoint yaitu selat malaka dan selat sunda. Hal inilah yang menjadi faktor kemakmuran kerajaan sriwijaya karena menguasai dua selat penting yang digunakan sebagai jalur transportasi perairan. pengelolaan selat malaka yang menjadi rute perdagangan yang menghubungkan wilayah sriwijaya ke daratan

⁴⁶ William H. Frederick, And Robert L., Dan Worden, Indonesia A Country Study, 2013

Tiongkok merupakan salah satu faktor yang mendorong kejayaan kerajaan sriwijaya dalam bidang kemaritiman.

Dalam catatan buku berjudul “*Heterogenetic Cities In Premodern Southeast Asia*” dijelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Dinasti Song, Kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan produksi barang karena keuntungan yang didapatkan atas perdagangan meningkatkan pertumbuhan industry dalam negeri mereka. Dari catatan perkembangan kerajaan sriwijaya, dapat digambarkan bahwa memungkinkan wilayah sriwijaya merupakan pusat perdagangan besar dunia. dalam kasus yang sama juga di temukan pada sejarah perkembangan kerajaan majapahit. Kerajaan majapahit juga menjadi salah satu contoh penerapan konsep *sea power* geopolitik untuk membangun negara maritim. Dibawa pemerintahan raden wijaya hingga hayam wuruk dan patih gajah mada, kerajaan majapahit berhasil untuk mewujudkan sumpahnya untuk mempersatukan nusantara sebagai kekuasaan dari kerajaan majapahit. Dibawah pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan majapahit merubah orientasi pemerintahan yang berfokus pada wilayah darat menuju kerajaan maritim dengan menguasai jalur perdagangan laut di Asia Tenggara dari Semenanjung Melayu, Sumatera, Kalimantan Hingga Sulawesi. Tidak hanya itu, kerjasama antar negara juga dilakukan untuk memperkuat pengaruhnya baik di bidang politik atau perekonomian dengan Ayuthaya di Thailand, Champa di Vietnam, Dinasti Ming di Tiongkok, dinasti Jo-seon di Semenanjung Korea, Kerajaan Syangka di Srilangka dan

Kekaisaran Muromachi di Jepang.⁴⁷ Dalam catatan kitab Nagarakertagama, menyebutkan bahwa Temasik (kini Singapura) merupakan pilar utama kejayaan perekonomian dan pusat interaksi kepentingan banyak kerajaan untuk menjalin hubungan satu sama lain.

John N. Miksic seorang arkeolog AS, mengidentifikasi adanya negara dengan kekuatan maritime dari kerajaan lain seperti Kerajaan Banten, Kerajaan Gowa dan Tallo hingga Kerajaan Demak sebagai produsen dalam jaringan perdagangan internasional. Sejarah kemaritiman juga mencatat adanya pengembangan industri perkapalan di wilayah Indonesia Timur yang dibawah kesatuan kerajaan gowa dan tallo pasca runtuhnya kerajaan Melaka dan menjadi hub-perdagangan Internasional pada saat itu. Berdasarkan bukti sejarah yang telah ditemukan, masyarakat Indonesia juga mengidentifikasi salah satu alasan bagi kedatangan para kolonial ke wilayah Indonesia untuk menghasilkan komoditas rempah.⁴⁸ Dari sejarah perkembangan peradaban Indonesia, dapat kita pelajari bahwa bangsa ini selalu terlibat dalam pergaulan internasional. Catatan sejarah juga menegaskan pentingnya penguasaan kedaulan sebagai sebuah tinjauan dalam proses pelaksanaan bernegara. Deskripsi sejarah juga membawa pada penguasaan laut merupakan penentu kemakmuran dan prestise nasional bagi perkembangan di masa depan.⁴⁹

⁴⁷ John N. Miksic, "Heterogenetic Cities In Premodern Southeast Asia," *World Archaeology* 32, No. 1 (2000): 106–20, <https://doi.org/10.1080/004382400409916>.

⁴⁸ Frederick, L., dan Worden, *Indonesia A Country Study*. Hlm 8

⁴⁹ Abdul Wahab, "Ekonomi Internasional," 2017, 235.

Dalam study Geopolitik, Sir Walter Reileigh mengatakan “bahwa barang siapa yang menguasai perairan maka dia akan menguasai perdagangan dan barang siapa yang menguasai perdagangan maka akan menguasai dunia”. Dari tinjauan sejarah yang telah di jelaskan dapat disimpulkan bahwa peradaban Indonesia tidak lepas atas penguasaan kemaritiman dalam mencapai kemakmuran dan kejayaan. Sehingga hal ini menegaskan bahwa pentingnya pemahaman mengenai ruang kedaulatan dan sejarah peradaban bangsa dalam proses pelaksanaan bernegara. Alferd mahan juga telah menjelaskan proses-proses dalam membangun sebuah kekuatan maritim yang tertuang dalam bukunya “*The Influence of Sea Power Upon History*”. Menurutnya dalam membangun sebuah negara maritim setidaknya terdapat enam karakteristik utama dalam membentuk kekuatan maritim, diantaranya: posisi geografis, bentuk fisik suatu negara, luasnya wilayah, jumlah penduduk, karakter masyarakatnya, dan dukungan dan pemerintahan negara.⁵⁰

Pertama posisi geografis, Indonesia sendiri terletak pada posisi geografis yang utama antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan juga berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, yang dapat dikatakan sebagai Laut Mediterania bagi geopolitik Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia secara geografi mencapai 5,8 juta Km² mencakup: 3,2 juta km² perairan teritorial, 2,7 juta Km² ZEE. Sekitar 70 % wilayahnya berupa perairan yang digunakan untuk jalur transportasi pelayaraan dan

⁵⁰ John B. Hattendorf, “The Influence Of Hystory On Mahan,” Naval War College Press, No. February 2004 (1991): 279–305.

perdagangan internasional. Jika ditinjau dari sejarah dan wilayah kedaulatan Indonesia, sangat rasional bagi Indonesia untuk membangun kekuatan kemaritiman yang disebabkan oleh alasan-alasan tersebut. pembangunan kekuatan maritim merupakan upaya dalam menjaga, melindungi dan memanfaatkan potensi yang ada sebagai sebuah kepentingan nasional. Sehingga, dalam proyeksi tersebut, dibutuhkan sebuah komitmen bersama untuk terlibat mulai dari perumusan kebijakan, implementasi hingga operasional kerja. Dengan dasar inilah, pada masa pemerintahan Joko Widodo sebuah perubahan orientasi pemerintahan lahir dengan gagasan ide pembangunan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia. visi Indonesia sebagai poros maritim merupakan salah satu langkah bagi bangsa ini untuk merekonstruksi sector maritim guna mengamankan sumber daya laut dan memberikan perlindungan terhadap jalur perdagangan internasional.

Tentunya hal ini sangat penting untuk perkembangan bangsa Indonesia kedepannya. Namun disisi lain, kapasitas pertahanan dan keamanan yang dimiliki menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mewujudkan ambisi tersebut. sejarah mencatat bahwa keberhasilan dalam orientasi pemerintahan dipengaruhi oleh dukungan kapasitas yang proporsional dalam menjalankan kepentingannya dari berbagai sektor termasuk ekonomi dan pertahanan. Setidaknya terdapat pertahanan di wilayah strategis seperti lalu lintas di Selat Malaka dan memproyeksikan kekuatan

angkatan laut untuk menempatkan armada mereka dengan tujuan untuk penjagaan dan keamanan lalu lintas.⁵¹

Gagasan Poros Maritim pertama kali disampaikan presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur Myanmar tahun 2014. Pada forum tersebut, presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan kemaritiman merupakan kepentingan nasional yang disebabkan oleh wilayah geografis Indonesia. Presiden Joko Widodo ingin mengembalikan penguasaan perairan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Konsep poros maritim dunia diharapkan menjadi sebuah jembatan yang mempersatukan seluruh wilayah kedaulatan Indonesia yang didasarkan atas deklarasi djuanda. Tidak hanya itu, beliau mengatakan bahwa Laut, merupakan basis kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia sekaligus masa depan bagi bangsa Indonesia. Dengan dasar tersebut konektifitas merupakan kata kunci untuk meraih cita-citanya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.⁵² Poros maritime juga diperkuat dengan adanya Hukum internasional terkait batas wilayah, meliputi daratan, perairan dan udara yang terdiri atas *Internal Water, Achipelagic Water, Achipelagic Sea Lanes, Territorial Sea, continental shelves, Zone Ekonomi Eksklusif Dan Provincial Maritime Zone*. Batas batas tersebut merupakan kewajiban negara untuk melindungi keamanan dan pertahanan

⁵¹ John B. Hattendorf, "The Influence Of Hystory On Mahan," Naval War College Press, No. February 2004 (1991): 279–305.

⁵² Poltak Partogi Nainggolan, Rizki Roza, Dan Simela Victor Muhammad, *Agenda Poros Maritim Dunia Dan Perubahan Lingkungan Strategis*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2015.

wilayah yuridis Indonesia serta melindungi seluruh sumberdaya dan keanekaragaman hayati berdasarkan hak kedaulatan dan hukum yang ada di Indonesia.⁵³

Dalam mewujudkan visi poros maritime, presiden Joko Widodo mengeluarkan strategi sebagai upaya dalam menghubungkan pulau, karena infrasutrukture yang baik dan merata merupakan hal yang penting sebagai jembatan penghubung kepulauan dari wilayah Indonesia. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung dalam berbagai fasilitas akan tergambarkan harapan terwujudnya visi kemaritiman yang menjadi pilar dalam peningkatan ekonomi seperti penanaman modal untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya, dan kerjasama antar negara.⁵⁴ Dalam bidang pertahanan nasional, pemerintahan Joko Widodo mengupayakan terwujudnya konsep ini dengan pemberantasan kriminalitas pada sector perairan yang menjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembakaran dan penenggelaman kapal yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ide poros maritim dunia, merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang disebut strategi pengembangan pertahanan dan keamanan maritim ditujukan untuk pelabuhan, transportasi kelautan seperti kapal dan pelabuh, konektifitas wilayah

⁵³ Kresno Buntoro, "Wilayah Nusantara Dalam Perspektif Hukum Laut Dan Beberapa Implikasi," *Majalah Cakrawala Tni Al* 1957 (2014).

⁵⁴ M. Najeri Al Syahrin, "Kebijakan Poros Maritim Joko Widodo Dan Sinergitas Strategi Ekonomi Dan Keamanan Laut Indonesia," *Indonesian Perspective* 3, No. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.14710/Ip.V3i1.20175>.

melalui pembangunan jalur transportasi bebas hambatan dalam skala internasional.⁵⁵ Dalam study keamanan, gagasan poros maritim memberikan sikap responsif bagi sebagian negara-negara, terutama dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, menimbulkan sikap responsif bagi negara lain terhadap penerapan visi ini. Ambisi pembangunan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki dasar bahwa; *pertama*, karakteristik geografis negara dan sejarah yang menjadi latar belakang dalam implemtasi kepentingan. Dalam hal ini, konsep poros maritim memiliki arti yang sangat kompleks salah satunya sebagai jalur lintas perairan internasional dimana perairan merupakan titik kepentingan politik ekonomi dan pertahanan keamanan yang sangat sensitif bagi kepentingan perekonomian global. Dibutuhkan sebuah komponen yang matang seperti kebijakan pertahanan dan stabilitas ekonomi politik yang mampu untuk mewujudkan visi tersebut. *Kedua*, poros maritime merupakan sebagai sumber kekuatan di abad ke-21. Dalam pandangan geopolitik, wilayah perairan merupakan jembatan penghubung antar kawasan atau disebut sebagai jalur perantara yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya sebagai alternatif dalam mencapai kepentingan nasional. Dengan bergesernya tatanan dunia di abad ini, yang semula bipolar ke unipolar, dan multipolar, dengan menguatnya peran aktor non-negara, Asia Tenggara menjadi kawasan strategis berperan dalam menentukan kegiatan perdagangan internasional. Kehadiran hegemoni AS dan Tiongkok juga menjadi salah

⁵⁵ Metta Anastashya Aryo Dan Wishnu Mahendra Wiswayana, “Orientasi Baru Kebijakan Di Laut Oleh Pemerintah Indonesia: Pergeseran Dari Deterensi Ke Strategi Ekonomi (The New Maritime Policy Orientation Of Indonesian Government: Shifting From Deterrence To Economic Strategy),” *Jurnal Lemhannas Ri* 8, No. 2 (2020): 57–75.

satu factor yang memicu lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara. Mengingat, potensi dari kekayaan alam yang tinggi sebagai sumber energy di abad ini, memicu persaingan ekonomi dan politik untuk memperbutkan pengaruh satu sama lain.⁵⁶

Dengan dinamika ini, visi Indonesia sebagai poros maritime dunia merupakan salah satu jawaban untuk membawa perekonomian Indonesia pada kelas menengah bawah (*lower middle income*) menuju penghasilan menengah atas (*upper middle income*), dengan membangun sector maritim sebagai pendorong perekonomian nasional. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, ambisi poros maritime membutuhkan kapasitas pertahanan maritime yang proporsional untuk mengamankan kedaulatan dan bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan navigasi dan keamanan maritime. Hal ini dibutuhkan mengingat pergerakan politik global yang merujuk pada pengelolaan sumber ekonomi tidak lagi terpaku pada penguasaan daratan melainkan pada sector perairan.⁵⁷ Oleh sebab itu, visi Indonesia sebagai poros maritime merupakan visi yang tepat untuk meningkatkan perekonomian nasional yang terfokus pada penguasaan sector maritim sebagai kekuatan utama pertahanan nasional.

Dalam mengupayakan keberhasilan dan tercapainya visi poros maritime sebagai kepentingan nasional, pemerintah Joko Widodo perlu mengamankan beberapa sector yang menjadi fokus kemaritimannya seperti: rute pelayaran, akses pasar dan akses sumberdaya di kawasan indo-pasifik. Bukan suatu hal yang mustahil apabila

⁵⁶ Miksic, "Heterogenetic Cities In Premodern Southeast Asia."

⁵⁷ Dr. Drs. Harun Umar M.Si, Politik Kebijakan Poros Maritim, 2020.

presiden Joko Widodo ingin membawa Indonesia menjadi negara maritim, mengingat banyaknya potensi dan keunggulan geografis yang dimiliki negara ini. Dengan ini, pemerintahan Joko Widodo perlu untuk menguasai posisi strategis yang mampu dimanfaatkan untuk kekuatan Indonesia dalam bidang kemaritiman seperti selat yang menjadi pintu keluar masuk perdagangan internasional. Kondisi ini akan memberikan ruang untuk membangun perekonomian Indonesia yang masih belum tertata dengan baik. Agenda mewujudkan Poros Maritim, memiliki lima pilar utama. Meliputi; *pertama*, pembangunan budaya maritim sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), gagasan pertama diharapkan bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola sektor laut.

Kedua, kemandirian bangsa atas pengelola sumber daya laut, pilar ini menfokuskan pada membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai actor utama mengelola sumberdaya laut sebagai kepentingan rakyat. *Ketiga*, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri maritim. *Keempat*, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. *Joko Widodo* beranggapan bahwa laut merupakan alat pemersatu bangsa bukan sebagai pemisah. *kelima*, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Menurut Joko Widodo, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim agar menjadi bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

2.4 Implikasi Posisi Geografis Indonesia Terhadap Pertahanan Nasional

Posisi Indonesia yang sangat strategis berada di antara samudra hindia dan samudra pasifik dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas transportasi laut. Kepemilikan wilayah perairan yang potensial dalam ekonomi, sektor maritime, juga menyimpan risiko yang tinggi seperti bencana alam dan perampokan. Namun, penggunaan jalur ini masih tetap eksis karena dipandang lebih efektif dan efisien untuk mendistribusikan barang atau menjalin interaksi ekonomi antar negara. Dalam kontes kepentingan nasional, munculnya arus globalisasi dan pengembangan teknologi memberikan kemudahan bagi perkembangan peradaban manusia baik dalam bidang ekonomi, politik atau social budaya. Namun disisilain, dinamika ini menimbulkan dampak ancaman yang cukup kompleks terhadap sektor pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan teknologi yang sangat cepat memicu banyak negara untuk bermain kepentingan dalam berbagai sektor menciptakan pengaruh dalam proses kehidupan bernegara.⁵⁸

Salah satu contoh, dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi atau teknologi oleh suatu negara memberikan dorongan bagi negara untuk mengembangkan hal yang sama meyebabkan persaingan yang memicu terjadinya konflik antar negara maupun antar

⁵⁸ Ramadhan Fardhal Virgiawan Dan Ade Chaerul, “Peluang Dan Tantangan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia: Perspektif Politik Internasional,” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1, No. 3 (2023): 262–72, <https://doi.org/10.47861/Tuturan.V1i3.459>.

kawasan. Terlebih lagi, pengembangan teknologi yang berkepanjangan menyebabkan eksploitasi sumberdaya alam yang tinggi. Sehingga hal ini, menyebabkan peluang terjadinya sikap ekspansionis terhadap negara lain yang berakibat pengerahan kekuatan militer demi memenuhi kebutuhan negara yang menyebabkan perang multidimensi untuk memperebutkan sumberdaya.⁵⁹

Dalam menyikapi dinamika ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan pertahanan negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi serta mengutamakan kesetaraan dan kebersamaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir perang berkelanjutan dan lebih mementingkan penyelesaian secara diplomatik. Indonesia juga berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menghormati kedaulatan setiap negara dan berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan baik antar negara ataupun kawasan. Pedoman tersebut merupakan dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pertahanan nasional dengan syarat pertimbangan yang mendasar sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. Kebijakan pertahanan negara mengacu pada visi dan misi pemerintahan yang diwujudkan secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara.⁶⁰

⁵⁹ Yanyan Mochamad Yani, Drs., Mair., Ph.D. "Dinamika Hubungan Internasional Dan Indonesia," 2010, 1–28, *Dinamika Hubungan Internasional Dan Indonesia*.Pdf.

⁶⁰ Kepala Badan Dan Pendidikan Dan, "Proxy War," *Economist* 372, No. 8390 (2004): 49–50, <https://doi.org/10.1017/9781108774314.008>.

Pembangunan pertahanan negara didesain dengan kekuatan pertahanan yang tangguh serta memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara maritim ditunjukkan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Prinsip pertahanan di selenggarakan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritime regional di kawasan Asia Pasifik dengan prinsip *defensive aktif* sebagai jaminan kepentingan nasional.⁶¹ Dalam konteks pertahanan nasional, pembangunan kekuatan pertahanan mengarah pada pembangunan postur kekuatan matra laut dan udara. Sedangkan kekuatan matra darat memiliki peran strategis sebagai kekuatan pertahanan pesisir dan pertahanan lapis dalam atas lokasi-lokasi strategis aspek kemaritiman, seperti pelabuhan laut, pembangkit listrik, jalur utama transportasi darat. Berdasarkan hal tersebut, Perlu adanya pertimbangan luas geografi dan kapasitas kekuatan yang memumpuni dari kebijakan yang dikeluarkan untuk membangun kekuatan pertahanan yang proporsioanl sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran dan keamanan maritime. Kebijakan yang diluncurkan juga sebagai dasar acuan bagi organisasi yang berwenang untuk menjalankan tugasnya secara optimal dan tepat. Sehingga, keberhasilan implemtasi dari agenda poros maritime akan bergantung pada kualitas pemerintahan.⁶²

Dalam mengupayakan pertahanan nasional, postur pertahanan didesain untuk membentuk kekuatan yang bersifat semester, diarahkan pada strategi MEF (*minimum*

⁶¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, 2015.

⁶² Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ri, "Kebijakan Kelautan Indonesia," Maritim.Go.Id, 2017, 70, https://Maritim.Go.Id/Konten/Unggahan/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_Vers.Pdf.

essential force) dengan komponen pada pemenuhan kekuatan pertahanan maritime dengan dukungan teknologi drone dan satelit. *Minimum essential force (MEF)* didefinisikan sebagai standar kekuatan minimum yang menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi militer nasional secara efektif. Pembangunan postur ini terbagi menjadi empat tahapan diantaranya; *pertama*, pembangunan skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*); *kedua*, pembangunan kemampuan kemandirian (*capability based defense*); *ketiga*, pengerahan kekuatan militer sesuai kemampuan ekonomi negara; dan *keempat*, pembangunan kekuatan pencegahan (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan perdamaian dunia. strategi pembangunan *minimum essential force* dilaksanakan melalui empat proses yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, pengadaan dan ditambah dengan strategi penghapusan. Penerapan strategi ini, bergantung pada konsistensi, komitmen dan kontinuitas dari lembaga yang melaksanakan yaitu TNI, AD, TNI AL dan TNI AU. Selain kebijakan bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi ini, juga ditentukan oleh kapasitas keberadaan alusista yang dimiliki.⁶³

Keberhasilan dalam pembangunan postur pertahanan ditentukan dari *capability-based planning* yang disusun berdasarkan penyesuaian MEF meliputi; aspek penentuan ancaman, aspek perencanaan, aspek mekanisme penyelenggaraan, aspek

⁶³ Permenhan Nomor 12, “Kebijakan Penyesuaian Minimum Essential Force Komponen Utama,” Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, No. 19 (2012): 4–35, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.Pdf>.

anggaran, dan aspek manajemen pengambilan keputusan MEF, serta personel dan organisasi. Pada bagian persoalan yang terkait dengan tahapan pencapaian, penyelarasan MEF terhadap realita pembangunan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari seluruh ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka menjamin terwujudnya visi, misi, dan agenda prioritas Pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan poros maritime dunia (PMD). Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pertahanan negara dirumuskan dalam lima sasaran strategis diantaranya; mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara; mewujudkan pertahanan Negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; dan mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara.⁶⁴

Sebagai salah satu negara strategis secara geopolitik dan geoekonomi, keberadaan Indonesia yang berada di asia pasifik juga sebagai pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan pertahanan. Mengingat perkembangan asia pasifik yang sangat dinamis diprediksi akan menjadi arena konflik kepentingan dalam mendapatkan akses sumberdaya. Sehingga, implikasi lahirnya poros maritim dunia mengarah pada

⁶⁴ Permenhan Nomor 12.

kepentingan Indonesia terhadap perubahan ekonomi dan konstelasi kekuasaan pada ranah global yang terjadi di kawasan ini.⁶⁵ Dinamika ini, secara tidak langsung menegaskan untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas pertahanan nasional dalam menjamin terciptanya stabilitas nasional maupun kawasan, terutama dalam hal stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Terlepas dari adanya pengaruh eksternal terhadap stabilitas pertahanan, kepentingan dan kebijakan juga perlu diperhatikan terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah yang merupakan jalur perdagangan internasional. Dengan kekayaan sumberdaya yang terkandung dalam negara ini, Indonesia perlu untuk memiliki kemampuan dan kekuatan yang memadai dalam menjaga pertahanan nasional yang di sebabkan atas dinamika politik global.

Dalam persoalan domestic terkait perairan, ambisi poros maritim telah menghadapi berbagai tantangan terutama pada pertahanan dan keamanan nasional. Pertahanan dan keamanan dalam suatu negara memiliki posisi yang vital, sebagai kunci utama pelaksanaan dalam memastikan integrasi nasional. Dalam persepektif demokrasi, Pertahanan nasional memiliki peran dan fungsi krusial dimana memiliki posisi sebagai parameter dari identitas berdirinya suatu negara. Hal ini menjadi penegasan bahwa, seberapa aktifnya pertahanan dalam politik sebuah negara, akan menggambarkan kebijakan yang dibentuk, namun kebijakan harus tetap berada dalam kontrol sipil yang efektif sebagai dasar kepentingan nasional. Sejalan dengan prinsip ini, pada

⁶⁵ Andi Widjajanto, "Transformasi Lemhannas Ri: Ketahanan Nasional Era Geopolitik 5.0," Orasi Ilmiah Hut Ke-57 Lemhannas Ri, 2022, 12, https://www.lemhannas.go.id/images/2022/Materi_Kup/Narasi_Geo_V_Orasi_Il ilmiah.Pdf.

pemerintahan Joko Widodo berdiri Kementerian Koordinator Bidang Maritim ditugaskan untuk menerjemahkan Indonesia sebagai poros maritim.

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Maritim menerbitkan “*Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia: Menuju Poros Maritim Dunia*”. berdasarkan isi dari buku tersebut, dijelaskan bahwa terdapat lima pilar yang telah dicanangkan tahun 2014 akan dikembangkan menjadi tujuh pilar Kebijakan Kelautan Indonesia. Tujuh pilar ini mencakup; pengelolaan sumber daya kelautan dan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari, dan diplomasi maritim. Secara garis besar, proyeksi poros maritim presiden Joko Widodo membutuhkan pembangunan dan pertumbuhan aspek ekonomi Indonesia, tidak terkecuali aspek pertahanan dan keamanan.⁶⁶

Poros Maritim Indonesia pada umumnya sangat mengedepankan bentuk-bentuk diplomasi dalam pemenuhan visinya, namun bukan tidak mungkin hal ini berbenturan dengan kepentingan negara lain. Sehingga, untuk merespon permasalahan ini, presiden Joko Widodo melakukan pendekatan *hard power* dalam memberikan haluan mengenai pertahanan maritim yang difokuskan pada empat bidang yakni, menjamin kebutuhan pertahanan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan penyediaan alutsista; Kemandirian pertahanan demi mengurangi ketergantungan pasokan produk;

⁶⁶ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ri, “Kebijakan Kelautan Indonesia.”

membangun pasukan TNI sebagai kekuatan yang disegani; dan menempatkan pertahanan dan keamanan negara dengan komprehensif sebagai bagian integral.⁶⁷

Sektor maritim merupakan salah satu sector unggulan bagi Indonesia yang menyimpan banyak sumber daya dan perikanan dengan nilai ekonomis tinggi. Karakteristik negara maritim memberikan posisi yang sentral bagi perekonomian di negara ini, Namun disisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan bernegara, salah satunya ialah menyebabkan kerentanan terhadap ancaman dan tindak kejahatan terhadap kedaulatan wilayah terutama pada daerah perbatasan. dinamika kemaritiman merupakan persoalan yang kompleks karena perairan merupakan titik penghubungan dan perantaranya dalam menjalin interaksi yang melibatkan banyak factor yang saling berkaitan. Dengan banyaknya factor factor yang terlibat dalam pemanfaatan sektor maritime, dibutuhkan pengelolaan yang holistik, adaktif dan proaktif untuk menjawab dinamika yang terjadi pada sektor maritim.

⁶⁷ Inspektorat Jenderal, “Joko Widodo : Kewibawaan Dan Kedaulatan Negara Di Atas Segalanya,” 2015, 1–4.